

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BKD PROVINSI JAWA TENGAH

Astri Denaya, Titik Djumiarti
Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

SIMPEG menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. SIMPEG sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk semua personalia yang ada, karena pegawai merupakan aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dikelola dengan baik. Permasalahan yang terjadi dalam masukan belum dapat mengelola SIMPEG dengan baik, dalam operasi kurang lengkapnya data yang akan diolah, dan dalam keluaran ketidaksesuaian data pegawai dengan fakta. Asumsi tersebut disebabkan oleh tidak efektifnya pengelolaan masukan, operasi dan keluaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan SIMPEG di BKD Provinsi Jawa Tengah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SIMPEG di BKD Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode analisis data domain menurut Spradley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMPEG di BKD Provinsi Jawa Tengah belum berjalan secara efektif, dilihat menggunakan indikator masukan, operasi dan keluaran. Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan SIMPEG, yaitu sumberdaya manusia yang terbatas, tidak semua pegawai dapat mengoperasikan komputer dan keterlambatan update data. Hasil penelitian ini merekomendasikan untuk memberikan motivasi pegawai dengan cara meningkatkan kemampuan dengan pelatihan tentang SIMPEG sehingga ada peningkatan pegawai yang menguasai Teknologi Informasi.

Kata Kunci: *Efektivitas, manajemen kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian*

ABSTRACT

SIMPEG according to the decision of the Minister of the Interior No. 17 year 2000 is a management information system which functions to manipulate the data, management and administrative personnel in local government environment. SIMPEG is very important in providing services to all personnel, because the employees are an important asset in the conduct of the organization that must be well managed. Problems occurred in the input has not been able to manage the SIMPEG well, in operation less complete data to be processed, and the output data discrepancies in employees with facts. That assumption is caused by not effectively managing input and output operations. The purpose of this research is to know the effectiveness of the implementation of SIMPEG in BKD Central Java, as well as the factors that influence the effectiveness of the implementation of SIMPEG in BKD Central Java. A descriptive qualitative research methods, data analysis methods with domain according to Spradley. The results showed that the implementation of SIMPEG in BKD Central Java have not run effectively, viewed using the input indicator, operation and output. Factors that hinder the provision of SIMPEG, namely, human resources are limited, not all employees can operate the computer and the delay in the update of the data. The results of this research are recommended to provide the motivation of employees by means of enhancing training about SIMPEG so there is an increase in the employee master information technology.

Keywords: *Effectiveness, Staffing management, Staffing Management Information System*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah merupakan instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah, telah membuat dan mengembangkan sebuah website

<http://simpeg.bkd.jatengprov.go.id/>.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 43 Ayat (2) menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan Informasi Kepegawaian kemudian digantikan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Menurut Keputusan Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas

perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu sistem informasi manajemen yang berfungsi untuk mengolah data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) mempunyai tujuan untuk terwujudnya suatu sistem informasi manajemen pengelolaan kepegawaian yang terintegrasi dalam suatu jaringan komputer, yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk semua personalia yang ada, karena pegawai merupakan aset penting dalam

penyelenggaraan organisasi yang harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pegawai yang baik dimulai dalam lingkup kecil, dengan lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai dan sedangkan untuk lingkup yang lebih besar akan membawa perbaikan kinerja perusahaan/pemerintah secara keseluruhan. Melihat pentingnya pengelolaan data pegawai, untuk itu diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa pegawai yang belum bisa mengoperasikan komputer sehingga menghambat dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Arif selaku kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah:

“Ada 26 orang yang tidak mengerti komputer. Tugasnya eselon IV sampai Desember nanti harus bisa mengerti komputer. Karena kita ingin menerapkan sistem berbasis *online*. *Center of excellent* Jawa Tengah dan reformasi birokrasi dan *core*

businessnya berada di BKD Jateng.” (Grand Desain Pengembangan Kompetensi ASN, LAN 2015).

Melalui website resmi yang berada pada laman <http://bkd.jatengprov.go.id/new/article/view/337>, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan berita yang berisi sistem database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya sempurna, masih banyak yang harus dibenahi untuk menjadi sistem yang bagus, termasuk juga data di dalamnya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada. Sistem database Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang belum sepenuhnya sempurna salah satunya ditunjukkan dengan ketidaksesuaian data dengan penempatan pegawai.

Sejauh ini pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) masih mengalami beberapa permasalahan seperti tidak sesuai penempatan pegawai dalam Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan banyaknya pegawai yang belum dapat mengoperasikan komputer sehingga menghambat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Melihat permasalahan tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) selama ini sehingga peneliti melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BKD Provinsi Jawa Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BKD Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG) di BKD Provinsi Jawa Tengah.

2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di BKD Provinsi Jawa Tengah.

D. Kajian Teori

Manajemen Publik

J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz (Pasolong, 2007:83), berpendapat bahwa dalam tahun 1990an, manajemen publik mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat menantang, yaitu: privatisasi sebagai suatu alternative bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan control, keuangan dan penganggaran serta produktifitas sumber daya manusia.

Pengembangan manajemen publik dimasa mendatang, menurut *“The National Commission on Public Service”* di Amerika Serikat ditinjau oleh Ott, Hyde dan Sharfiz perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu perlu mengidentifikasikan secara jelas peran dan pelayanan publik dalam

proses yang demokratis, sekaligus standar etika dan kinerja yang tinggi dari para pejabat kunci; perlu fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan memperkerjakan dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para petinggi kabinet dan pimpinan instansi; pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh presiden harus dikurangi, dan lebih diberikan ruang pengembangan karier profesional dan pemerintah harus melakukan investasi lebih besar disbanding pendidikan dan pelatihan eksekutif dan manajemen (Pasolong, 2007:84).

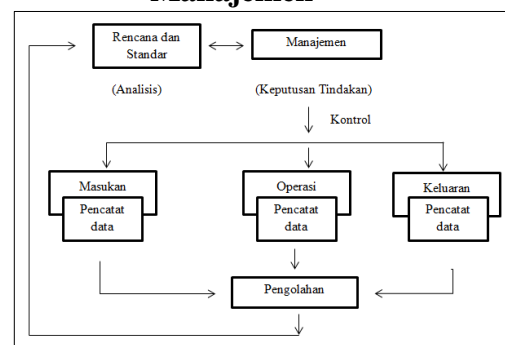
Sistem Informasi Manajemen

Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi (Davis, 2002:3).

Menurut Robert G. Murdick dan Joel E. Ross dalam Sutabri (2003: 91) sistem informasi manajemen adalah proses komunikasi dimana informasi masukan (*input*) direkam, disimpan dan diproses untuk menghasilkan *output* yang berupa keputusan tentang

perencanaan, pengoperasian dan pengawasan. Agar menjadi efektif, Sistem Informasi Manajemen (SIM) harus mendapat data sedekat-dekatnya dengan titik asalnya, dan kemudian menyalurkannya ke tempat-tempat pengolah informasi di mana data itu akan digunakan. Berikut ini merupakan anatomi sistem informasi manajemen:

Gambar 1.1
Anatomi Sistem Informasi Manajemen



Terdapat tiga proses efektivitas Sistem Informasi Manajemen, yaitu:

1. Masukan, merupakan tahap awal dalam pengelolaan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mencatat data yang dibutuhkan.
2. Operasi, merupakan tahap pengelolaan setelah data yang dibutuhkan diterima.
3. Keluaran, merupakan tahapan yang dihasilkan dari pengelolaan data pada tahap masukan dan operasi.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen dalam negeri dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketerantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dijelaskan tentang komponen-komponen Sistem Informasi Manajemen yang terdiri dari perangkat keras yang dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian meliputi perangkat-perangkat yang digunakan oleh sistem komputer untuk masukan

dan keluaran; perangkat lunak yang dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berupa perangkat program, prosedur dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem; sumberdaya manusia dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berupa karyawan tenaga kerja; database dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan himpunan data seluruh Pegawai Negeri yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan aparatur negara di Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan jaringan dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan susunan komponen komunikasi yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya, serta faktor yang berpengaruh terhadap proses berlangsungnya komunikasi.

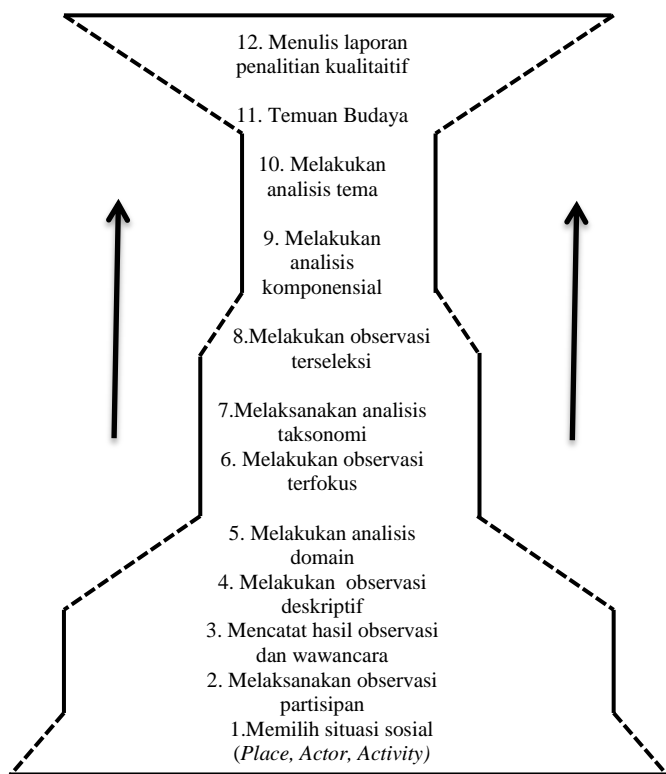
E. Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh bersumber dari data primer hasil wawancara dan data sekunder dari buku dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Tahapan analisis data yang diperoleh dilakukan mulai dari Pengumpulan Data; Reduksi Data yakni merangkum dan memilih hal-hal yang pokok; Uji Keabsahan data; Penyajian Data hasil penelitian; Penarikan Kesimpulan. Analisis data dilapangan dilakukan menggunakan analisis Spadley dalam Sugiyono (2016: 354-362).



Kualitas Data

Pengujian keabsahan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi Sumber yakni uji validitas dengan cara

mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Data wawancara dari satu narasumber di cek kembali dengan data hasil wawancara dengan sumber lain.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Faktor yang Menentukan Efektivitas Pengelolaan masukan (*input*) dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) petugas yang bertugas sebagai “kurir” seharusnya mendorong dalam kecepatan data dalam masukan (*input*), karena dengan adanya “kurir” membantu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam mengumpulkan data dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tetapi pada kenyataannya dengan adanya “kurir” belum mampu mendorong dalam kecepatan data dalam masukan (*input*) sehingga sistem yang diciptakan berkurang kemanfaatannya. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya pegawai yang malas untuk memperbarui data yang menyebabkan “kurir” tidak bisa menyerahkan data

dalam masukan (*input*) yang terbaru kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berupa website. Hal tersebut dilakukan dengan harapan supaya memudahkan dalam mengakses, karena dengan memudahkan dalam mengakses seharusnya mempermudah dalam pengumpulan data. Tetapi disisi lain, dengan kemudahan tersebut terdapat suatu kekurangan. Kekurangan dari *website* tersebut adalah mudah di *hack* atau rentan diretas, sehingga keamanan data masih perlu diperhatikan.

Data dalam masukan harus memiliki kevalidan dan keberharuan data. Sejauh ini, untuk kevalidan data tidak menjadi masalah karena data masukan yang dikumpulkan sudah ada *backup* datanya. Sehingga dengan adanya *backup* data, menyebabkan kevalidan dan pemberhauan data cenderung lebih terjamin kemanan datanya. Namun disisi lain, terkait permasalahan data masih terjadi keterlambatan pada *update* data.

Prosedur menurut Kumoroto (Sutabri 2003: 102) merupakan

peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Data yang dikumpulkan dilapangan cenderung lebih mudah sistemnya, sesuai dengan teori prosedur menurut Kumorotomo.

b. Analisis Faktor yang Menentukan Efektivitas Pengelolaan dalam Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dikelola oleh satu bidang yakni Bidang Informasi Kepegawaian bagian Pengelolaan Data Kepegawaian Badan Kepegawaian Kepegawaian (BKD) Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pegawai 15 orang. Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian SIMPEG dapat dilakukan tepat waktu, namun sejauh ini keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) tersebut cenderung menjadi kendala sendiri dalam pengelolaan cenderung terhambat, waktu dalam pengerjaan juga cenderung lama.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang menggunakan sistem *website*, dirasa telah mempermudah dalam

pengoperasian data kepegawaian di Provinsi Jawa Tengah. Berbeda dengan sistem aplikasi desktop yang harus di instal terlebih dahulu, sistem *website* tidak membutuhkan penginstalan terlebih dahulu dan bisa langsung diakses melalui alamat *websitenya* saja.

Pengupdate data yang dikelola masih cenderung lambat karena proses penginputan atau pengumpulan data juga cenderung lambat. Kecenderungan kelambatan pengupdatean data tersebut salah satunya disebabkan oleh masih adanya sikap malas atau enggan melakukan pelaporan pembaharuan data ketika pegawai tersebut mengalami perubahan status misalnya naik pangkat atau mutasi. Keterlambatan pengupdatean data tersebut di dalam proses pengelolaan tersebut cenderung mendorong terhambatnya pembaharuan data informasi kepegawaian.

Adanya prosedur atau SOP pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) cenderung menjadi lebih cepat karena masing-masing aktor yang berperan telah memiliki dan menjalankan fungsi masing, selain itu prosedur dalam pengelolaan atau pengoperasian Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) juga lebih mudah di aplikasikan dan cenderung tidak rumit.

c. Analisis Faktor yang Menentukan Efektivitas Pengelolaan Keluaran (*output*) dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

Pada dasarnya untuk mengakses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) setiap pengguna harus dapat mengoperasikan komputer. Tetapi kenyataan yang ditemukan di lapangan adalah tidak semua pegawai dapat mengoperasikan komputer. Hal tersebut menghambat dalam penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) tersebut berbentuk *website*. Kelebihan menggunakan sistem *website* adalah untuk memudahkan pegawai dalam membutuhkan data kepegawaian. Karena pegawai dapat mengakses Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dimana saja dengan cara memasukkan *username* dan *password*.

Data dalam keluaran (*output*) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sudah jelas dan memenuhi kebutuhan data kepegawaian. Dengan kelengkapan data kepegawaian yang ada di dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) cenderung mendorong karena memudahkan pegawai apabila mereka membutuhkan data kepegawaian.

Dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk memperoleh data kepegawaian, setiap pegawai yang mengakses data membutuhkan *username* dan *password* dan tidak ada prosedur lain yang harus dilalui sehingga di dalam pengaksesan data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) cenderung lebih mudah dan tidak rumit.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah sesuai dengan Keputusan Dalam Negeri nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), yang mempunyai tujuan untuk terwujudnya

suatu sistem informasi manajemen pengelolaan kepegawaian yang berhubungan dengan jaringan komputer. Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dapat dikatakan efektif apabila data sudah lengkap dan tepat, tetapi pada penelitian ini pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) masih belum berjalan secara efektif, karena masih ditemukan beberapa kendala yang dapat dilihat sebagai berikut:

- a) masukan (*input*) kendala berupa keterlambatan *update* data yang disebabkan karena sikap malas untuk memperbarui data;
- b) pengolahan/ operasi kendala berupa sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas;
- c) keluaran (*output*) kendala berupa tidak semua pegawai bisa mengoperasikan/ menggunakan komputer.

Faktor-faktor yang menghambat dalam efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yaitu sumberdaya manusia (SDM) yang terbatas, tidak semua pegawai bisa mengoperasikan/

menggunakan komputer dan keterlambatan updat data. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong dalam efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yaitu penggunaan *website* dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sehingga memudahkan pengguna apabila akan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan prosedur yang jelas sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Saran

- 1) Pegawai setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diberikan pengarahan berupa motivasi dalam waktu 2 bulan sekali supaya dapat meningkatkan disiplin kerja sehingga pegawai dapat lebih aktif dalam memperbarui data kepegawaian dan memberikan *reward* bagi pegawai yang disiplin dalam memperbarui data.
- 2) Perlu adanya penambahan pegawai yang ahli dalam menguasai Teknologi Informasi sehingga dapat membantu mengatasi permasalahan keterbatasan pegawai yang mengelola Sistem Informasi

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

- 3) Sistem update data dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dapat ditingkatkan dan diperbarui sehingga data kepegawaian dapat diperbaharui secara otomatis, tanpa harus diinput oleh pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

DAFTAR PUSTAKA

- BKD Provinsi Jawa Tengah. 2015. Dalam <http://bkd.jatengprov.go.id/> diakses pada tanggal 30 November 2017.
- Davis, Gordon. 2002. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Teruna Grafica.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
- Kumoroto, Wahyudi. 2009. *Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi-organisasi Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat. 2005. *Pengantar Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, Tata. 2003. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.